



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II

Per 31 Desember 2024

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE**

2024





RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Ternate TA.2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA.2024 Berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. **25.330.000** Atau mencapai 65 persen, dari estimasi pendapatan sebesar Rp. **39.050.000**.

Realisasi Belanja Negara TA. 2024 adalah sebesar Rp. **2.872.050.503** atau 98 persen terhadap anggaran sebesar Rp.**2.927.192.000**. Pada Tahun 2024 Stasiun KIPM Ternate telah melakukan revisi RKAKL sebanyak 14 kali.

Keterangan	Anggaran	Revisi Tingkat	Tanggal Revisi	Perihal
DIPA Awal	5.634.987.000		24 November 2023	
Revisi Ke 01	3.101.895.000	Kanwil DJPB	15 Februari 2024	Pengalihan Ke BKI
Revisi Ke 02	3.101.895.000	Kanwil DJPB	25 Januari 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 03	3.101.895.000	Kanwil DJPB	15 Februari 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 04	3.101.895.000	Kanwil DJPB	15 Maret 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 05	3.101.895.000	Kanwil DJPB	22 April 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 06	3.101.895.000	Kanwil DJPB	29 Mei 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 07	3.101.895.000	Kanwil DJPB	24 Juni 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 08	2.936.896.049	Kanwil DJPB	26 Juni 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 09	2.691.896.000	Kanwil DJPB	31 Juli 2024	Penghematan Anggaran dan Usulan Blokir
Revisi Ke 10	2.691.896.000	Kanwil DJPB	14 Oktober 2024	Revisi Blokir
Revisi Ke 11	2.691.896.000	Kanwil DJPB	07 November 2024	Revisi Blokir
Revisi Ke 12	2.927.192.000	Kanwil DJPB	22 November 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 13	2.927.192.000	Kanwil DJPB	29 November 2024	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 14	2.927.192.000	Kanwil DJPB	11 Desember 2024	Revisi POK

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2024.

Jumlah Aset per tanggal 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp.3.137.420.613** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.60.903.650**, Aset Tetap sebesar **Rp.3.076.516.963**. Sedangkan Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp.0** dan **Rp.3.137.420.613**.

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.24.970.000**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp.3.167.352.730**, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp.(3.142.382.730)**. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar **Rp.8.921.250**, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp.(3.151.303.980)**.

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.7.039.024.983**, dikurangi dengan Defisit-LO sebesar **Rp.(3.162.585.802)**, Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.750.300.390** maka terjadi penurunan Ekuitas sebesar **Rp.(3.912.886.192)** sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp.3.126.138.791**.



4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KIPM TERNATE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	39.050.000	25.330.000	64,87	61.604.202
JUMLAH PENDAPATAN		39.050.000	25.330.000	64,87	61.604.202
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.023.451.000	1.021.653.812	99,82	5.601.200.165
Belanja Barang	B.4	1.903.741.000	1.850.396.691	97,20	2.585.590.228
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.927.192.000	2.872.050.503	98,12	8.186.790.393



II. NERACA

**STASIUN KIPM TERNATE
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2		
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.3		
Persediaan	C.4	60.903.650	183.838.338
Jumlah Aset Lancar	C.5	60.903.650	183.838.338
ASET TETAP			
Tanah	C.6	1.098.077.000	2.966.927.000
Peralatan dan Mesin	C.7	4.594.015.717	6.332.936.317
Gedung dan Bangunan	C.8	1.966.238.000	3.805.685.931
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	38.748.000	125.616.200
Aset Tetap Lainnya	C.10		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(4.620.561.754)	(6.359.516.434)
Jumlah Aset Tetap		3.076.516.963	6.871.649.014
JUMLAH ASET		3.137.420.613	7.055.487.352
KEWAJIBAN			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.11	11.281.822	16.462.369
KEWAJIBAN		11.281.822	16.462.369
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	3.137.420.613	7.039.024.983
EKUITAS		3.137.420.613	7.039.024.983
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.148.702.435	7.055.487.352



III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM TERNATE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
- Pajak	D.1	24.970.000	58.770.000
JUMLAH PENDAPATAN		24.970.000	58.770.000
BEBAN			
- Beban Pegawai	D.2	1.021.653.812	2.585.590.228
- Beban Persediaan	D.3	219.809.858	227.811.508
- Beban Barang dan Jasa	D.4	1.137.146.635	1.439.133.469
- Beban Pemeliharaan	D.5	165.282.313	386.149.938
- Beban Perjalanan Dinas	D.6	436.355.454	737.596.730
- Beban Penyusutan dan	D.7	187.104.658	418.496.751
- Beban Penyisihan Piutang Tak	D.8	-	-
- Tertagih			
JUMLAH BEBAN		3.167.352.730	5.794.778.624
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.142.382.730)	(5.736.008.624)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
- Pendapatan Pelepasan Aset			
- Non Lancar		9.750.900	9.750.900
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		9.750.900	9.750.900
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.774.260	8.774.260
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8.774.260)	(8.774.260)
SURPLUS/DEFISITDARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		976.640	976.640
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR		(3.141.406.090)	(5.735.031.984)
POS LUAR BIASA	D.10		
- Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3.141.406.090)	(5.735.031.984)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KIPM TERNATE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	7.039.024.983	7.262.133.723
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.162.585.802)	(2.601.147.822)
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI ATS REKLASIFIKASI	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP/LAIN	E.4.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	750.300.390	5.540.624.463
KENAIKAN/PENURUNAN EKIUTAS		(3.912.886.192)	(223.108.740)
EKUITAS AKHIR	E..6	3.126.138.791	7.039.024.983



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Ternate

*Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis*

Stasiun KIPM Ternate adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Stasiun KIPM Ternate berkedudukan di Komplek Bandara Sultan Babullah Ternate.

Visi : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, berkelanjutan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Misi : - Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

- Meningkatkan penerapan praktik yang baik disetiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Tujuan :” Peningkatan lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ”

Sasaran :” Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Stasiun KIPM Ternate”

Stasiun KIPM Ternate memiliki 5 orang PNS, 1 PPPK, 7 orang PPNPN dan 3 orang pegawai dengan mekanisme PJLP.

Jenis Layanan Stasiun KIPM Ternate adalah sertifikasi kesehatan dan produk perikanan domestik dan ekspor, pengujian laboratorium, sertifikasi IKI dan CKIB, Sertifikasi CPIB dan HACCP, Saran dan Pengaduan. Jam Pelayanan kantor Stasiun KIPM Ternate adalah Senin-Minggu Jam 07.30 WIT s/d 16.00 WIT.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Ternate. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Kantor Stasiun KIPM Ternate menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Ternate dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Ternate. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Ternate adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapa
tan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasar azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas

dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap



Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Stasiun KIPM Ternate telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 14 (empat belas) kali. Bermula dari DIPA AWAL sebesar Rp. 5.634.897.000. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	PAGU	PNBP	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
DIPA AWAL	5.634.897.000	26.900.000	2.788.293.000	2.846.604.000	-
Revisi Ke-01	3.101.895.000	18.210.000	1.133.860.000	1.968.035.000	-
Revisi Ke-02	3.101.895.000	18.210.000	1.133.860.000	1.968.035.000	-
Revisi Ke-03	3.101.895.000	18.210.000	1.133.860.000	1.968.035.000	-
Revisi Ke-04	3.101.895.000	18.210.000	1.133.860.000	1.968.035.000	-
Revisi Ke-05	3.101.895.000	18.210.000	1.133.860.000	1.968.035.000	-
Revisi Ke-06	3.101.895.000	18.210.000	1.133.860.000	1.968.035.000	-
Revisi Ke-07	3.101.895.000	18.210.000	1.133.860.000	1.968.035.000	-
Revisi Ke-08	2.691.896.000	16.122.000	963.155.000	1.728.741.000	-
Revisi Ke-09	2.691.896.000	16.122.000	963.155.000	1.728.741.000	-
Revisi Ke-10	2.691.896.000	16.122.000	963.155.000	1.728.741.000	-
Revisi Ke-11	2.927.192.000	16.122.000	1.023.451.000	1.903.741.000	-
Revisi Ke-12	2.927.192.000	16.122.000	1.023.451.000	1.903.741.000	-
Revisi Ke-13	2.927.192.000	16.122.000	1.023.451.000	1.903.741.000	-
Revisi Ke-14	2.927.192.000	16.122.000	1.023.451.000	1.903.741.000	-

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp.25.330.000*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.25.330.000 atau mencapai 65 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 39.050.000. Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Ternate terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Berupa Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya, dan Pendapatan Jasa Karantina

Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	360.000	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	36.250.000	23.610.000	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	2.800.000	1.360.000	49
Jumlah	39.050.000	25.330.000	65

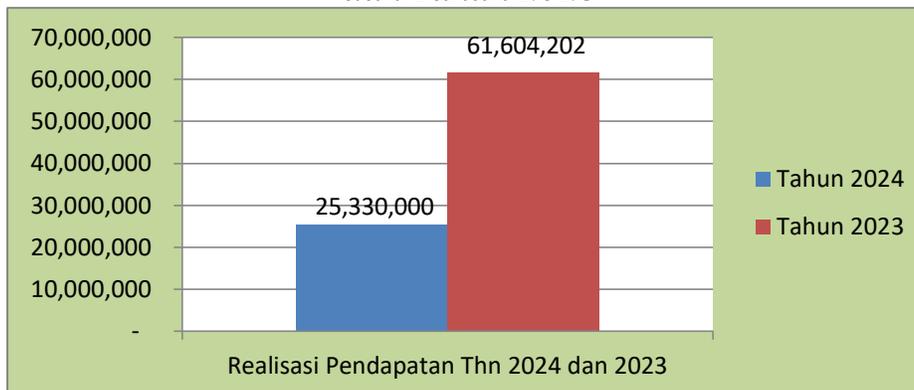
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2023 dimana realisasi mencapai Rp. 61.604.202 atau 58 persen dari estimasi. Hal ini disebabkan adanya, antara lain:

1. Faktor alam yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi frekuensi lalu lintas ekspor produk perikanan di Maluku Utara.
2. Adanya PP 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana pengenaan tarif hanya untuk proses bisnis layanan ekspor dan impor dan sesuai dengan SOTK terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menangani Sertifikasi produk perikanan domestik.
3. Adanya PNBPN yang dialihkan ke Badan Karantina Indonesia sebesar Rp. 5.320.000

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	25.330.000	61.604.202	-58,88
Jumlah	25.330.000	61.604.202	-58,88

Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2023



B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp.2.872.
050.000*

Realisasi Belanja Instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp.2.872.050.503 atau 98,12 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.2.927.192.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.023.451.000	1.021.653.812	99,82
Belanja Barang	1.903.741.000	1.850.396.691	97,20
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2.927.192.000	2.872.050.503	98,12

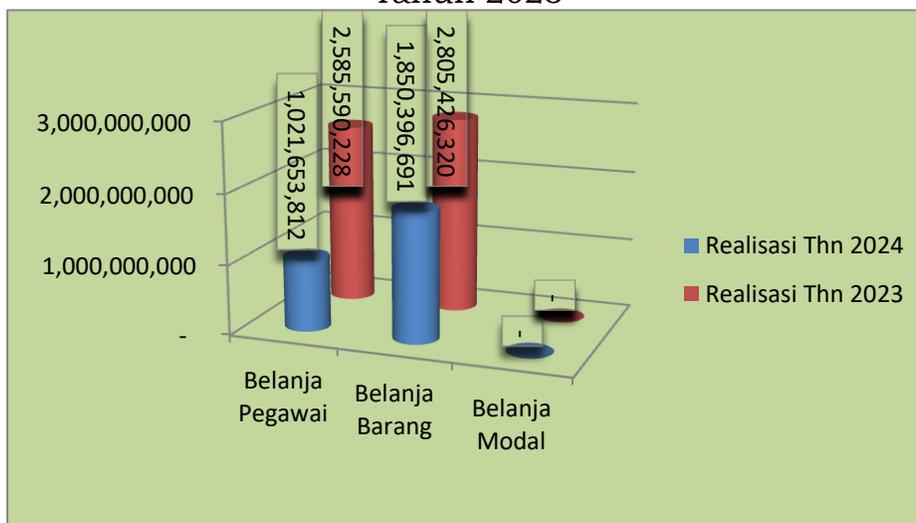
Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 46,73 persen, hal ini disebabkan antara lain :

1. Tidak adanya anggaran belanja modal,
2. Adanya perubahan pagu.
3. Adanya pengalihan anggaran belanja pegawai ke Badan Karantina Indoensia

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.021.653.812	2.585.590.228	(60,49)
Belanja Barang	1.850.396.691	2.805.426.320	(34,04)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2.872.050.503	5.391.016.548	(46,73)

Grafik Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023

**B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja Pegawai
Rp.1.021.653.812*

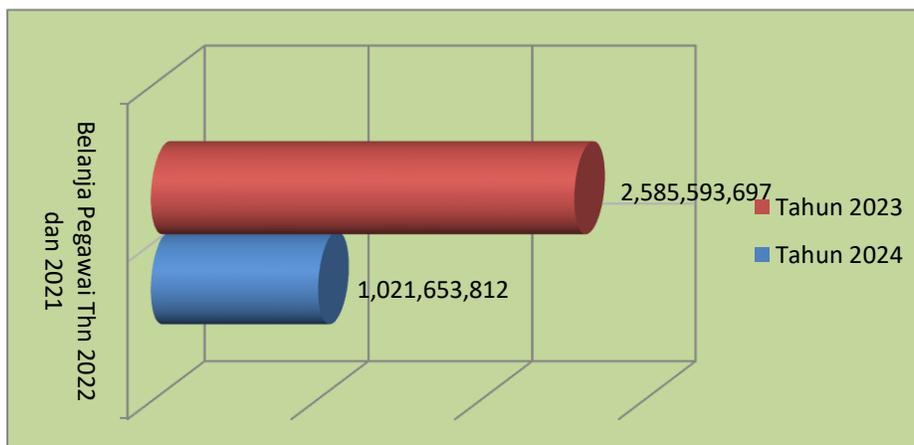
Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.1.021.653.812 dan Rp.2.585.590.228. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang telah ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan kepada para pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 3,77

persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pengalihan PNS sejumlah 14 orang ke Badan Karantina Indonesia.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS & PPPK	353.022.600	902.998.720	(60,91)
Belanja Pembulatan Gaji PNS & PPPK	5.154	17.272	(70,16)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS & PPPK	30.285.770	76.997.840	(60,67)
Belanja Tunj.Anak PNS & PPPK	10.101.934	27.180.224	(62,83)
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	13.680.000	(44,74)
Belanja Tunj.Fungsional PNS & PPPK	18.040.000	66.000.000	(72,67)
Belanja Tunj.PPh PNS & PPPK	1.535.152	81.650	1.780,16
Belanja Tunj.Beras PNS & PPPK	25.709.100	70.392.240	(63,48)
Belanja Uang Makan PNS & PPPK	47.020.000	142.256.000	(66,95)
Belanja Tunj. Umum PNS & PPPK	5.420.000	7.885.000	(31,26)
Belanja Uang Lembur PNS & PPPK	63.473.000	119.959.000	(47,09)
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PNS	459.481.102	1.158.146.385	(60,33)
Jumlah Belanja Kotor	1.021.653.812	2.585.594.331	(60,49)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(364)	(100,00)
Jumlah Belanja	1.021.653.812	2.585.593.967	(60,49)

Grafik Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023



*Belanja
Barang
Rp.1.850.
396.691*

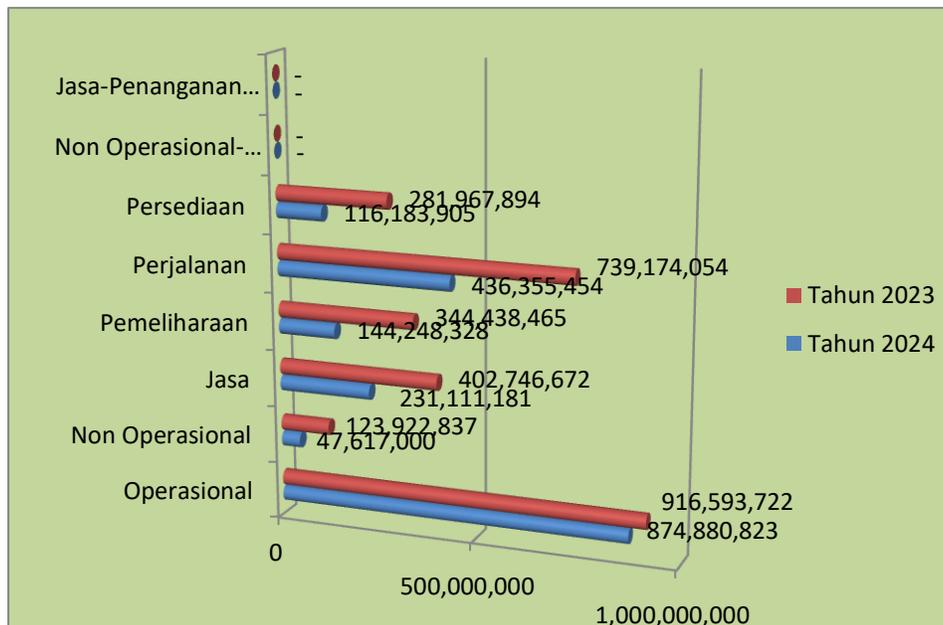
B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.850.396.691 dan Rp.2.805.426.320. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 34.12 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan pada belanja barang operasional, belanja jasa, belanja persediaan, dan tidak terdapat belanja jasa-penanganan Pandemi Covid-19.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	874.880.823	916.593.722	(4,55)
Belanja Barang Non Operasional	47.617.000	123.922.837	(61,58)
Belanja Jasa	231.111.181	402.746.672	(42,62)
Belanja Pemeliharaan	144.248.328	344.438.465	(58,12)
Belanja Perjalanan	436.355.454	739.174.054	(40,97)
Belanja Persediaan	116.183.905	281.967.894	(58,80)
Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.850.396.691	2.808.843.644	(34,12)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.850.396.691	2.808.843.644	(34,12)

Grafik Perbandingan Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023



B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp.0

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.210.183.617. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2023 karena tidak ada anggaran belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	210.183.617	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	210.183.617	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	210.183.617	-100,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi pada TA 2024 tidak ada dikarenakan tidak ada pembelian tanah pada Kantor Stasiun KIPM Ternate.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp.0 oleh karena itu mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp.210.183.617. Hal ini tidak adanya anggaran belanja modal peralatan dan mesin di lingkungan kantor Stasiun KIPM Ternate.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Mesin Absensi	-	5.200.000	
Meja Kerja Kayu	-	8.000.000	
Kursi Kayu	-	7.200.000	
AC Split	-	13.170.000	
PC Unit	-	76.550.000	
Laptop	-	52.980.000	
Sice	-	6.700.000	
Backdrobe TV	-	7.100.000	
Televisi	-	20.221.735	
Timbangan Barang	-	1.500.000	
Kursi Dorong	-	1.726.882	
Note Book	-	9.835.000	
Jumlah Belanja Kotor	0	210.183.617	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	210.183.617	-100,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dibandingkan Realisasi TA

2023, karena pada tahun 2024 juga tidak terdapat anggaran belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pagar Permanen	-	-	0,00
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar 0 dan Rp.0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal TA 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak Terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024.

B.6 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

*Belanja
Bantuan
Sosial
Rp0*

Realisasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak terdapat realisasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2024.

B.7 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak terdapat realisasi Belanja Subsidi TA 2024.



B.8 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak terdapat realisasi Belanja Hibah TA 2024.

B.9 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak terdapat realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp. 0. Hal ini disebabkan karena setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Jasa karantina Ikan langsung disetor ke kas Negara sehingga tidak saldo uang tunai maupun uang di bank.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang
PNBP Rp.0*

C.4 Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNBPNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp.0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian
Piutang
Bukan Pajak
Rp.0*

C.6 Bagian Piutang Bukan Pajak

Saldo Bagian Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.84.202 dan Rp.827.551. Bagian Piutang Bukan Pajak di Stasiun KIPM Ternate adalah potongan Tunjangan Kinerja bulan Desember Tahun 2024 yang telah dibayarkan kepada pegawai.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar*

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Rp.0

per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp.0*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-

Persediaan
Rp.60.903.650
0

masing sebesar Rp.60.903.650 dan Rp.183.838.338. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	10.007.840	142.032.621
Bahan untuk Pemeliharaan	2.176.310	2.627.390
Bahan Baku	48.719.500	39.178.327
Jumlah	60.903.650	183.838.338

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Persediaan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 karena ada penghapusan.

Tagihan
TP/TGR
Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang



*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp.0*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.13 Tanah

*Tanah
Rp.1.098.077.0
00*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Ternate per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.098.077.000 dan Rp. 2.966.927.000, Pada tahun 2024 terjadi pengurangan aset berupa tanah yang dialihkan ke Badan Karantina Indonesia.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.098.077.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	1.868.850.000
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	2.966.927.000

C.14 Peralatan dan Mesin

*Peralatan
dan Mesin
Rp.4.594.015.7
17*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.4.594.015.717 dan Rp.6.332.936.317. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.594.015.717
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	1.738.920.600
Dalam Proses Penghapusan di KPKNL	-
Saldo per 31 Desember 2024	4.594.015.717
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	4.245.130.831
Nilai Buku per 31 Desember 2024	348.884.886

C.15 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp.1.966.238.0
00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.966.238.000 dan Rp.3.805.685.931 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.966.238.000
Mutasi tambah:	
- Gedung Kantor Permanen	-
- Gedung Laboratorium Permanen	-
- Pagar Permanen	-
Mutasi Kurang:	
- Revaluasi BMN	1.839.447.931
Saldo per 31 Desember 2024	1.966.238.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	358.688.866
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.607.549.134

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Jaring
an dan
Irigasi
Rp.38.748.00
0*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.38.748.000 dan Rp.125.616.200 . Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	38.748.000
Mutasi tambah:	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi Kurang:	
-Revaluasi Aset	86.868.200
Saldo per 31 Desember 2024	38.748.000
Akumulasi s.d per 31 Desember 2024	38.748.000
Nilai Buku per 31 Desember 2024	38.748.000

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.0*

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 0 dan Rp.0. Adapun Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
-Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(4.620.561.
754)*

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.(4.620.561.754) dan Rp.(6.359.516.434). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2024*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	4.620.515.717	4.245.130.831	375.384.886
Gedung dan Bangunan	1.966.238.000	358.688.866	1.607.549.134
Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.748.000	16.742.057	22.005.943
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	6.625.501.717	4.620.561.754	2.004.939.963

C.20 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp.11.281.8
22*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.11.281.822 dan Rp.16.462.369, Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.21 Ekuitas

*Ekuitas
Rp.3.137.42
0.613*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.137.420.613 dan Rp.7.039.024.983. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp.24.970.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.24.970.000 dan Rp.58.770.000. Pendapatan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 58% dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini disebabkan adanya perubahan iklim cuaca di perairan Maluku Utara yang tidak menentu sehingga mempengaruhi frekuensi lalu lintas ekspor produk perikanan serta tidak adanya pelayanan sertifikasi kesehatan ikan untuk produk domestik. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA.2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	24.970.000	58.770.000	(58)
Jumlah	24.970.000	58.770.000	(58)

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp.1.021.653.812*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.021.653.812 dan Rp.2.585.590.228. Adanya penurunan beban pegawai Tahun 2024 disebabkan adanya pegawai yang dialihkan statusnya sebagai pegawai Badan Karantina Indonesia. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS & PPPK	353.022.600	902.998.720	(60,91)
Belanja Pembulatan Gaji PNS & PPPK	5.154	17.272	(70,16)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS & PPPK	30.285.770	76.997.840	(60,67)
Belanja Tunj.Anak PNS & PPPK	10.101.934	27.180.224	(62,83)
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	13.680.000	(44,74)
Belanja Tunj.Fungsional PNS & PPPK	18.040.000	66.000.000	(72,67)
Belanja Tunj.PPh PNS & PPPK	1.535.152	81.650	1.780,16
Belanja Tunj.Beras PNS & PPPK	25.709.100	70.392.240	(63,48)
Belanja Uang Makan PNS & PPPK	47.020.000	142.256.000	(66,95)
Belanja Tunj. Umum PNS & PPPK	5.420.000	7.885.000	(31,26)
Belanja Uang Lembur PNS & PPPK	63.473.000	119.959.000	(47,09)
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PNS	459.481.102	1.158.146.385	(60,33)
Jumlah Belanja Kotor	1.021.653.812	2.585.594.331	(60,49)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(364)	(100,00)
Jumlah Belanja	1.021.653.812	2.585.593.967	(60,49)

*Beban
Persediaan
Rp.219.809.
858*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 219.809.858 dan Rp.227.811.508. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang akan dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	180.631.531	138.057.394	31
Beban Persediaan Bahan Baku	39.178.327	143.910.500	-73
Jumlah	219.809.858	281.967.894	-22

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp.1.148.42
8.457*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.148.428.457 dan Rp. 1.422.671.100. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	732.185.041	600.318.965	21,97
Beban Panambah Daya Tahan Tubuh	34.845.000	99.792.000	(65,08)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.974.020	14.229.980	(72,07)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.804.000	119.220.000	(62,42)
Beban Operasional Lainnya	55.662.605	73.056.210	(23,81)
Beban Bahan	44.353.000	104.189.827	(57,43)
Beban Honor Output Kegiatan	3.264.000	8.160.000	(60,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	11.573.010	(100,00)
Beban Langganan Listrik	118.808.647	135.397.526	(12,25)
Beban Langganan Telepon	3.576.844	4.870.859	(26,57)
Beban Langganan Air	9.845.500	9.619.250	2,35
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	646.800	0	0,00
Beban Sewa	0	29.774.623	(100,00)
Beban Jasa Profesi	3.600.000	13.030.000	(72,37)
Beban Jasa Lainnya	92.863.000	199.438.850	(53,44)
Jumlah	1.148.428.457	1.422.671.100	(19,28)

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.165.282.
313*

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.165.282.313 dan Rp. 386.149.938. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan pada pemeliharaan peralatan dan mesin untuk menjaga barang milik Negara dalam kondisi bagus dan siap pakai. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.997.000	124.604.728	(90,37)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132.251.328	219.833.737	(39,84)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	21.033.985	41.711.473	(49,57)
Jumlah	165.282.313	386.149.938	(57,20)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.436.355.
454*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.436.355.454 dan Rp.737.596.730. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	399.557.571	411.150.699	-2,82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	84.593.307	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.797.883	241.852.724	-84,79
Jumlah	436.355.454	737.596.730	-40,84

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Stasiun KIPM Ternate tidak terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun 2024 maupun 2023.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Di Kantor Stasiun KIPM Ternate tidak terdapat Beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp.187.104.
658*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.187.104.658 dan Rp.418.496.751. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.909.993	184.197.409	(24,04)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.310.154	45.310.154	-
Beban Penyusutan Irigasi	975.135	975.135	-
Beban Penyusutan Jaringan	909.376	909.375	0,00
JUMAH PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	187.104.658	231.392.073	(19)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

D.12 Kegiatan Non Operasional

*Surplus
(Defisit) dari
Kegiatan
Non
Operasional
Rp.8.921.250*

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.921.250 dan Rp.27.725.000. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.921.250	27.725.000	(68)
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	8.921.250	27.725.000	
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	8.921.250	27.725.000	(67,82)

D.13 Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa Rp.0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Adapun Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas
Awal Rp.
7.039.024.983*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.7.039.024.983 dan Rp. 7.262.133.723

E.2. Surplus (Defisit) LO

*Surplus/Defi
sit LO
Rp.(3.162.585.
802)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.(3.162.585.802) dan Rp.(5.763.733.624). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp.0*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi
Aset
TetapRp.0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset
Tetap/Lainnya
Non
Revaluasi
Rp.0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

*Koreksi
Lain-Lain
Rp.0*

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.421. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi
Antar
EntitasRp.750
.300.390*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.750.300.390 dan Rp.5.540.624.463. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.



Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(25.330.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.872.050.503
Transfer Masuk	1.725.250
Transfer Keluar	3.598.746.143
Jumlah	750.300.390

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga tanggal 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp.(25.330.000) sedangkan DKEL sebesar Rp.2.872.050.503.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk / Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.725.250.

Rincian Transfer Masuk

Nama Barang	Nama Satker	No. Bukti	Tgl Dokumen	Tgl Buku	Nilai
HC	SESBAN	705/BKIPM.1/PL.520/XII/2024	30-12-2024	30-12-2024	1.725.250
Jumlah					1.725.250



E.5 Ekuitas Akhir

*Ekuitas
Akhir
Rp.3.126.13
8.791*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.126.138.791 dan Rp.7.039.024.983.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada tanggal pelaporan/penyusunan laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 terjadi adanya :

1. Adanya Revisi DIPA sebanyak 14 kali, dengan DIPA Awal sebesar Rp.5.634.897.000 kemudian pada Revisi DIPA ke-1 sampai dengan Revisi ke-7 menjadi 3.101.895.000 karena adanya pengalihan anggaran ke Badan Karantina Indonesia selanjutnya pada Revisi DIPA ke-8 sampai dengan Revisi ke-10 berubah menjadi Rp.2.691.896.000, dan pada Revisi ke-11 sampai dengan Revisi ke-14 kembali menjadi Rp.2.927.192.000.
2. Tidak terdapat pagu anggaran belanja modal di Lingkup Stasiun KIPM Ternate pada tahun anggaran 2024.

